

KONDISI SOSIAL EKONOMI BURUH PABRIK GULA SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PASCA G 30 S TAHUN 1965-1998

Ilin Suryantono
SMP Negeri 3 Tirto Pekalongan

ABSTRACT

The presence of labor in the sugar industry was once used as a political tool during the conflict in 1965 and became the party that is often neglected in the subsequent period between the years 1965-1998. On the one hand, sugar factory was one of plantation sectors having crucial position as one of development achievement of the new order government, because it increased income. It is an irony to see that workers having a vital role for the development of the country's economy but rather their fate are often not addressed by the state. Fundamental problems that later emerged in the life of labor is poverty, but the truth of this argument needs to be proved through research in order to obtain accurate answers.

Keywords: Labor, sugar factory, event G 30 S

ABSTRAK

Keberadaan buruh di pabrik gula menjadi salah satu alat politik pada tahun 1965 dan menjadi tersisih pada masa berikutnya pada tahun 1965-1998. Di satu sisi, pabrik gula menjadi salah satu sektor perkebunan yang memiliki posisi penting sebagai salah satu capaian pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru, karena posisinya penting dalam meningkatkan pemasukan dalam negeri. Hal ini sangat ironi ketika melihat peran pekerja yang memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi sering kali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Permasalahan utama yang muncul dalam kehidupan buruh adalah kemiskinan, tetapi permasalahan ini membutuhkan pembuktian melalui penelitian untuk menemukan jawaban yang tepat.

Kata kunci: buruh, pabrik gula, peristiwa G 30 S

PENDAHULUAN

Sejak VOC dibubarkan pada tahun 1779, Indonesia secara resmi berada dibawah pemerintahan Hindia Belanda. Adalah Johannes Van Den Bosch yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia dan mendeklarasikan pelaksanaan *Cultuurstelsel* yang mengharuskan rakyat Jawa menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Tanaman yang harus ditanami antara lain kopi, tebu, karet dan nila untuk dijual kepada Pemerintah Kolonial. *Cultuur Stelsel* bertujuan untuk memperoleh keuntungan

besar dari daerah tropis akibat kerugian yang diderita Belanda dalam perang-perang Napoleon dan hutang yang membumbung tinggi sebagai imbas dari kekalahan dalam perang itu (Ricklefs, 1989 : 183).

Di benua Eropa gula merupakan salah satu barang dagangan yang laku keras sehingga tidak mengherankan apabila bangsa Belanda mewajibkan kepada daerah jajahannya untuk menanam tebu. Notojuwono menyebutkan bahwa sejarah tanaman tebu berasal dari Papua dan dibawa ke kepulauan lain di Indonesia untuk selanjutnya

tersebar ke Malaya, Filipina, Thailand dan India. Tanaman ini kemudian berkembang pesat di pulau Jawa karena tanahnya yang subur dan sistem cocok tanam yang digunakan sangat sederhana.

Dari sinilah kemudian muncul perkebunan-perkebunan besar terutama dalam hal industri gula. Pabrik-pabrik gula mulai berkembang. Pada masa VOC masih berdiri saja tercatat ada 130-an pabrik gula yang tersebar di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di Pulau Jawa terutama pesisir utara Jawa. Sektor inilah yang sedikit demi sedikit merubah corak kehidupan masyarakat Jawa khususnya dari ketergantungan pada cocok tanam padi menjadi industri sekalipun tetap dalam tataran sebagai buruh. Lama-kelamaan penggunaan tenaga manusia menjadi kurang efektif mengingat kemajuan teknologi yang menuntut kecepatan produksi. Permasalahan yang kemudian timbul adalah soal mengurus hubungan pabrik gula dengan desa-desa dimana pabrik itu terikat secara simbolis.

Ketika sistem tanam paksa akhirnya dihapuskan pada paruh kedua abad XIX, pihak swasta justru mendapat kesempatan luas untuk berkibrah. Peran dominan pertanian dalam kegiatan ekonomipun terus berlangsung. Di pulau Jawa perluasan penanaman tebu, kopi dan lain-lain tanaman ekspor terus berkembang pesat dan sebaliknya perluasan lahan petani tidak lagi seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Kebutuhan hidup petani yang terus mende-sak menyebabkan perusahaan-perusahaan Barat semakin tidak perlu merasa khawatir akan kekurangan tenaga kerja karena sumber penghidupan sendiri sangat minim dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan para petani kemudian terpaksa menjual tenaga mereka kepada perkebunan-

perkebunan besar.

Pada tahun 1870, pihak Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria ditambah dengan berbagai peraturan tambahan yang memungkinkan pemindahan tanggung jawab secara langsung guna menjamin agar Jawa tetap menguntungkan bagi usaha swasta serta mencegah agar usaha serupa tidak menghancurkan ekonomi desa yang merupakan landasan tempat mendapat keuntungan bagi Sistem Perkebunan Besar (*Corporate Plantation System*) (Geertz, 1983:87). Undang-Undang Agraria dalam arti formal menandai berakhirnya sistem tanam paksa di Jawa dan beralihnya sistem itu ke zaman liberalisme yang lebih bebas. Arah politik di Indonesiapun bergeser dari lumbung eksploitasi pemerintah menjadi terbukanya sumber daya alam bagi kepentingan modal swasta.

Sampai awal abad XX, industri ini terus mengalami perkembangan pesat. Peran industri gula kemudian berkembang menjadi dunia ketiga bagi sebuah negara di samping pemerintahan dan rakyat (Knight, 2002: 183). Beberapa ahli meyakini bahwa pada masa itu Indonesia disituasikan dalam ketergantungan pada gula. Inti argumen ketergantungan adalah gula mampu memperoleh dan mempertahankan posisi kompetitifnya hanya melalui paksaan ekstra ekonomis. Knight dalam Linblad (2002) menyatakan bahwa gula membuat Jawa terbelakang baik melalui penyalahgunaan sumber daya agraris maupun pengiriman modal yang terkumpul ke luar negeri.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tanah yang disediakan untuk gula dapat disediakan secara lebih menguntungkan dan progresif untuk yang lain khususnya tanaman-tanaman pangan. Lagipula dengan melakukan demikian gula mempunyai pengaruh yang merusak bagi total perkembangan agraris distrik-

distrik gula di Jawa melalui penyero-botan irigasi dan gangguan seluruh siklus pertanian akibat jadwal yang diberlakukan oleh tebu pada tanaman-tanaman yang lain.

Indonesia mewarisi ekonomi penjajah yang memelihara sistem ekonomi dualistis. Di satu pihak terdapat sektor modern yang berorientasi pada ekspor yang kebetulan dikuasai oleh elit Kota dan perusahaan, sementara di lain pihak terdapat sektor tradisional yang berorientasi pada sektor pertanian yang masih bersifat subsisten. Para elite umumnya menunjukkan minat dari dorongan yang tinggi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Widjaja, 1988: 98).

Perusahaan perkebunan dibuka dengan cara menyewakan tanah negara atau dengan menyewa tanah penduduk. Akan tetapi perkebunan tebu sebagian besar dibuka dengan cara menyewa tanah penduduk terutama di daerah persawahan yang relatif padat penduduknya. Hal ini dikarenakan tanaman tebu membutuhkan sistem pengairan dan kesuburan tanah yang sama dengan padi. Daerah dengan penduduk yang padat merupakan sumber tenaga kerja yang murah. Pada daerah pertanian yang agraris, perkebunan dapat menghemat sejumlah biaya dengan menggerakkan sejumlah penduduk untuk melaksanakan kerja wajib, kadang-kadang secara sukarela namun kadang-kadang disertai ancaman dari kepala desa atau atasannya dengan terlebih dulu diadakan perjanjian sewa tanah dengan pihak perkebunan.

Perkebunan kemudian menanami 1/3 sawah desa dengan tebu. Sesudah matang ketika berumur 12 bulan dengan kadar *sucrose* 10%, tebu mulai dipanen. Masa panen berlangsung terus sampai yang terakhir dipanen berumur 18 bulan ketika kadar *sucrose* telah mencapai 14% sampai 15%. Masa panen

tebu atau masa giling atau masa kampanye berlangsung antara Mei-Oktober. Areal yang telah selesai dipanen dikembalikan segera kepada pemiliknya yang segera akan ditanami dengan padi ataupun palawija (Sulistyo, 1995: 17). Tanaman tebu tetap menjadi prioritas dari masa pemerintahan Kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka dimana industri di sektor ini masih ditumbuhkembangkan dan mengalami kenaikan yang sangat pesat.

Kondisi perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan mulai menampilkan coraknya pada masa demokrasi terpimpin dimana pemerintah banyak melakukan nasionalisasi terhadap sektor perkebunan besar. Untuk menjamin ketersediaan bahan bagi industri gula dan mengatur masalah sewa tanah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sewa Tanah tahun 1960 yang berisi antara lain perusahaan gula dijamin mendapat akses tanah dan bila perlu menggunakan kekuatan yang dimiliki penguasa daerah. Sektor tanaman komersial rakyat memperlihatkan beberapa pertumbuhan dari 1960-1967, tetapi sektor perkebunan besar justru mengalami kemunduran terutama tahun-tahun 1964-1967. Hal ini sebagian disebabkan sektor perkebunan yang sebagian besar dimiliki Belanda dan dengan demikian dipengaruhi tindakan nasionalisasi.

Perekonomian Indonesia pertengahan tahun 1960-an dalam kondisi menyedihkan. Inflasi berjalan cepat, produksi *mandeg*, kemiskinan dan kelaparan meluas dan sekelompok kecil minoritas dengan akses izin import memperkaya diri sendiri sementara pendapatan setiap orang benar-benar merosot. Infrastruktur menurun, investasi publik yang baru dicurahkan untuk mempertahankan perlengkapan maupun untuk beberapa sektor.

Investasi swasta juga hampir ber-

henti sama sekali. Secara ringkas, Indonesia pada pertengahan 1960-an merupakan negara dengan permasalahan ekonomi sekaligus potensi ekonomi yang sangat besar (Booth dalam Linblad, 2002: 507).

Carut marut ekonomi ini seolah semakin didukung oleh kondisi perpolitikan Indonesia pada masa itu. Belum selesai dengan permasalahan yang disebabkan masa demokrasi tepimpin oleh Soekarno, permasalahan politik lainpun datang. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno mengambil keputusan politik yang aneh dan tidak populer (Sulistyo, 2000: 42). Tindakan ini adalah *sanering* atau pemotongan nilai nominal mata uang rupiah dari Rp 1000 menjadi Rp 1 dengan maksud memecahkan permasalahan defisit perekonomian. Namun dari kebijakan perekonomian ini, rakyat justru lebih suka menyimpan barang daripada uang. Akibatnya inflasipun terus terjadi yang berarti menyimpang dari tujuan awal dari kebijakan ini yang ingin menghilangkan inflasi.

Kondisi perekonomian semakin sulit. Keinginan orang-orang Indonesia untuk berkuasa secara penuh atas perekonomian mereka sendiri mulai ditunjukkan. Nasionalisasi atas banyak perusahaan-perusahaan Belanda untuk dijadikan aset pemerintah adalah salah satunya, namun pada kenyataannya keinginan ini seolah tidak pernah terpenuhi secara penuh (Thee Kian Wie dalam Linblad, 2002: 383). Hal ini disebabkan dominasi dari para usahawan Cina. Usahawan ini dapat dikatakan menguasai bagian-bagian ekonomi krusial termasuk perdagangan antara di wilayah pedesaan dan perdagangan eceran di wilayah perkotaan. Hal yang terjadi kemudian adalah dominasi etnis Cina sebagai penguasa sektor ekonomi menggantikan bangsa Belanda.

Melihat kondisi ini pemerintah

berusaha membatasi eksistensi etnis Cina dalam perekonomian nasional. Salah satu caranya adalah pemberlakuan politik benteng. Dalam pelaksanaannya program ini pun tetap berantakan yang disebabkan aktivitas ekonomi orang-orang Cina jauh lebih banyak terjalin dengan orang-orang Indonesia pribumi dibandingkan Belanda dan peranan mereka dalam perdagangan antara.

Faktor lain adalah persahabatan akrab antara Presiden Sukarno dengan Cina pada awal tahun 1960-an (Linblad, 2002: 391). Sikap permusuhan Indonesia atas bangsa Barat semakin meningkat terutama AS dan Inggris karena oposisi mereka atas program ganyang Malaysia. Langkah politik yang ditempuh Sukarno kemudian adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Inggris maupun perusahaan Barat lainnya dan memberlakukan semacam politik isolasi dengan jalan menolak penanaman modal asing di Indonesia.

Suasana yang tak kalah kacanya terjadi dalam panggung politik dimana kaum politisi berpengaruh lebih besar daripada birokrat. Keadaan ini lagi-lagi disebut-sebut akibat kepemimpinan Sukarno yang menganggap pembangunan politik lebih penting dari pembangunan manapun. Sistem multipartai juga mengakibatkan suatu partai yang berhasil memasukkan kadernya ke dalam lembaga eksekutif maka mereka akan berusaha menempatkan anggota partainya ke dalam birokrasi pemerintahan.

Pada masa ini, banyak pejabat pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai birokrat dalam kenyataannya justru aktif dalam berpolitik (Widjaja, 1988: 78). Itu artinya jabatan yang mereka sandang tidak sejalan dengan tanggung jawab yang harusnya mereka emban. Ketidakakuran antara tiga pilar penguasa (Sukarno, TNI (dalam hal ini Angkatan Darat), serta PKI) dalam me-

mandang permasalahan juga semakin memperkeruh suasana.

Puncaknya terjadi pada tanggal 30 September 1965 dengan terjadinya pen-culikan sejumlah Jenderal yang diduga terlibat dalam Dewan Jenderal yang berniat melakukan kudeta dan menggulingkan Sukarno oleh PKI untuk selanjutnya dibunuh dan jasadnya dibuang disebuah sumur tua di kawasan Lubang buaya.

Pergerakan buruh sering terpecah oleh pengendalian partai-partai politik yang berusaha membentuk serikat buruh sebagai anak organisasinya (*underbow*). Dalam kasus Pabrik Gula Sragi, hal ini tampak dari keberadaan Serikat Buruh Gula dan Kesatuan Buruh Gula yang menjadi kepanjangan tangan dari komunis dan marhaenis. Peristiwa 30 September 1965 kemudian membawa implikasi pada terlarangnya kegiatan Partai Komunis Indonesia di segala bidang disertai penangkapan yang seringkali disertai pembantaian (Sulistyo, 2000: 65), pemecatan bagi semua orang yang terlibat maupun dicurigai terlibat dalam kegiatan Partai Komunis Indonesia. Eksistensi buruh yang terlanjur dicapai sebagai basis komunis kemudian dibatasi dengan memberikan "cap" komunis terhadap semua kekuatan/kegiatan yang mengganggu stabilitas pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan PG Sragi sejak berdiri hingga tahun 1998, mengungkap kondisi sosial ekonomi buruh PG Sragi tahun 1965-1998, dan mengetahui korelasi antara peristiwa G30S dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Orba dalam bidang perburuhan.

Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode sejarah. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: sebagai tahap awal adalah pengumpulan sumber yang sesuai dengan permasalahan penelitian baik itu sumber primer maupun sekunder. Tahap berikutnya adalah kritik sumber, yaitu menilai keadaan dan keotentikan sumber yang ditemukan baik secara eksternal maupun internal. Langkah ketiga adalah tahap interpretasi atau penafsiran data yang sudah diseleksi sebelumnya. Tahap terakhir adalah penyusunan atau penulisan sejarah yaitu penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesis yang utuh sebagai suatu kesatuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pabrik Gula Sragi Sejak Berdiri Hingga Tahun 1998

Sejak tahun 1830 di Pekalongan terdapat tiga pabrik gula yang beroperasi untuk menggiling tebu-tebu *gubernement* yaitu Wonopringgo, Sragie, dan Kalimatie. Ketiga pabrik gula di Pekalongan ini memakai lahan sawah untuk tebu seluas sekitar 1500 *bau*, pabrik Sragi dan Kaliemati masing-masing menggunakan 400 *bau*, dan Wonopringo, yang terbesar, memakai 700 *bau* lahan sawah (Cahyono, 1988: 56).

Pengelolaan PG Sragi dipegang oleh Firma Annement and Co, sebuah perusahaan asing milik pemerintah Belanda. PG Sragi didirikan pada tahun 1836 di lahan seluas 141.270 meter persegi dan memproduksi gula mangkok putih. Dalam tesisnya, Edie Cahyono menyebutkan bahwa perancang PG Sragie adalah seorang arsitek asal Negeri Belanda yang bernama A. Zicseel. Gula yang dihasilkan pada waktu itu belum sebaik sekarang disebabkan pera-

latannya yang masih belum sempurna dan secanggih sekarang.

Para pegawai dan petani kebanyakan terdiri atas bekas budak yang dibebaskan. Mereka mengerjakan tanah untuk kaum feodal dan baru kemudian tanah mereka sendiri dapat dikerjakan. Alat-alat pertanian mengalami perbaikan agar petani mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Dengan demikian ada dua golongan kelas yang muncul di tengah-tengah masyarakat yaitu kelas feodal yang terdiri atas tuan-tuan tanah yang lebih berkuasa dalam hubungan sosial dan kelas buruh yang bertugas melayani mereka. Kepentingan kedua kelas ini berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kelas feodal lebih memikirkan keuntungan saja dengan mendirikan pabrik-pabrik sementara kaum buruh justru sebaliknya. Perkembangan inilah yang menyebabkan timbulnya masyarakat kapitalis yang menghendaki kebebasan ekonomi dan sebuah sistem feodal. Pada tahun 1835-1900 pihak swasta mulai masuk ke Indonesia yang menandai pemberlakuan Politik Pintu Terbuka dengan jaminan kebebasan dan keamanan bagi para pengusaha (Ricklefs, 2001: 269).

Pada tahun 1940-1945 banyak pabrik gula yang mengurangi jumlah produksinya karena hubungan dagang dengan luar negeri terputus. Indonesia jatuh ke tangan Jepang yang menyebabkan produksi gula terhenti karena Jepang lebih memilih fokus pada tanaman pangan bagi keperluan logistik perang dibandingkan sektor perkebunan besar. Baru pada awal tahun 1950-an industri gula mulai berproduksi kembali. Pemegang pucuk pimpinan dan sebagian pegawainya terdiri atas orang-orang Belanda dan orang Indonesia-Belanda (Mubyarto, 1991: 13).

PG Sragi mengalami perjalanan panjang setelah mengalami nasionalisasi, yaitu dimulai dari Keputusan

Menteri No. 229 /UM/1957 tertanggal 10 Desember 1957, perusahaan ini dijadikan Perusahaan Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) menyusul beberapa keputusan pemerintah yang menyebabkan PG Sragi secara berturut-turut berada dibawah naungan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN), PPN-Gula, Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), PT Perkebunan XV-XVI sampai akhirnya di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX).

Dalam perkembangan menuju nasionalisasi, pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri No. 229/UM/1957 tertanggal 10 Desember 1957, perusahaan ini dijadikan Perusahaan Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) dengan dikepalai Direktur Pusat Perkebunan Negara dan Kepala Jawatan Perkebunan di tingkat pusat. Untuk tingkat propinsi dikepalai oleh seorang Kepala Perwakilan Jawatan Perkebunan Jateng. Pada masa ini PPN Baru cabang Jateng membawahi 11 Pabrik Gula yang masing-masing dikepalai oleh seorang Administrator.

Dengan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN) yang berstatus badan hukum dan disertai tugas menyelenggarakan pekerjaan direksi perusahaan-perusahaan Negara di bidang perkebunan. BPU-PPN Jateng sendiri membawahi PPN Kesatuan Jateng I yang mengelola PG Tjepiring dan Rendeng, PPN Kesatuan Jateng II yang mengelola PG Banjardama, Jatibarang, Pangka, Sumberharjo, Sragi, Kalibagor, PPN Kesatuan Perintis yang mengelola PG/PS Comal dan PG Ceper baru, PPN Kesatuan Jateng V yang mengelola PG Colomadu, Tasikmadu, Gondang Baru, dan Mojo. Pada masa ini seorang pimpinan PG untuk pertama kalinya disebut sebagai pemimpin.

Dua tahun sesudahnya pemerintah mengeluarkan PP No. 1 tahun 1963 yang berisi seluruh pabrik gula dirubah menjadi PPN-Gula yang dipimpin oleh seorang direktur. Disamping bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian dan Agraria, maka direktur PG juga bertanggung jawab pula kepada BPU PPN-Gula.

Sejalan dengan perkembangan perpolitikan dalam negeri, maka dikeluarkan PP no.14 tahun 1968 yang berisi PPN diubah menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Berdasarkan ini maka perusahaan gula di Jawa Tengah dibagi menjadi dua bagian yaitu Jawa Tengah bagian utara dan Jawa Tengah bagian selatan. Pergantian ini tidak hanya namanya saja yang diganti tetapi juga dalam hal wewenang dan personalianya. Wewenang penuh pada PPN tadinya berada di tangan bagian produksi sedangkan wewenang PNP ada di tangan direksi. PG Sragi kemudian ber-naung dalam PNP XV.

Pada tahun 1974 berdasarkan PP No. 32/1974 PNP XV PG Sragi diubah menjadi PT Perkebunan XV (Persero). Perubahan nama ini dimulai tahun 1974. PG Sragi melakukan rehabilitasi kedua tahun 1975-1978 bersamaan dengan pemberlakuan program TRI yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas giling menjadi 3600 ton setiap harinya. Rehabilitasi ini ditangani oleh Proyek bersama *Sugar Consultant Consortium (SCC)* dari Australia.

Pada tahun 1975, Pemerintah mengambil kebijakan baru dalam bentuk Instruksi Presiden No. 9 yang diumumkan pada bulan April tahun itu juga. Tujuan Inpres ini adalah mengadakan perombakan sistem perkebunan tebu yang didasarkan atas sistem persewaan tanah rakyat menjadi sistem tebu rakyat dimana petani menjadi "pengusaha" tebu. (Mubyarto, 1983: 62).

Sesuai dengan Instruksi Presiden

No.9 tahun 1975 tadi, maka mulai tahun 1975 PG Sragi mengalihkan sedikit demi sedikit penanaman tebunya ke arah tanaman tebu rakyat intensifikasi dengan melaksanakan program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Mulai masa tanam 1980/1981 PG tidak lagi menanam tebu di atas tanah sewa. Pelaksanaan TRI Ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan petani pemilik tanah, meningkatkan produksi tebu secara intensif dengan tetap meningkatkan produksi gula. Usaha meningkatkan produksi terlihat dari luas areal penanaman TRI dan peningkatan kapasitas produksi penggilingan tebu menjadi gula. Dalam memasarkan gula hasil TRI dikenal dengan istilah "bagi hasil" yang didasarkan atas rendemen gula. Rendemen adalah persentase nilai nira perahan yang terdapat dalam tebu yang merupakan unsur pembentuk gula. Nilai rendemen gula dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: varietas tebu, kualitas hasil panen, jarak waktu antara panen dan giling, dan daya kerja mesin penggiling tebu (Bachriadi, 2004: 22).

Bagi pihak buruh PG Sragi, program TRI ini juga tidak terlalu memberikan perubahan yang signifikan dalam kegiatan giling maupun kegiatan lain di PG. Hal ini justru membuat tugas seorang buruh menjadi lebih ringan karena masalah penanaman dan perawatan tebu menjadi tanggung jawab petani tebu sementara PG hanya menjadi tukang giling semata.

Dalam rangka penyederhanaan Perusahaan maka berdasarkan akta Notaris GHS Loemban Tobing, SH No.7 tahun 1981, PG Sragipun berada dalam naungan PTP XV-XVI di bawah pimpinan seorang administratur dengan dewan direksi yang berkantor di Solo. Pihak direksi sendiri terdiri atas seorang direktur utama dan 3 orang direktur yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan cq Menteri Perta-

nian.

Kemudian sejak 1996 sampai sekarang PTPN IX didirikan dengan akte notaris Harun Kamil SH Nomor 42 tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1996. PTPN IX merupakan peleburan antara PTP XV-XVI (Tanaman Semusim) dengan PTP XVIII (Tanaman Tahunan). Modal dasar ditetapkan sebesar Rp 300 milyar. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 165 milyar merupakan modal yang telah disetor. Komoditi utama yang diusahakan adalah gula tetes (Tanaman Semusim) dan karet, teh, kopi, kakao (Tanaman Tahunan). Sampai saat ini PG Sragi menyangga 2 PG yang dinonaktifkan yaitu (1) Eks-PG Cepiring-Kendal yang didirikan diatas tanah seluas 193.490 meter persegi dan (2) Eks-PG Comal Baru yang didirikan diatas tanah seluas 376.550 meter persegi.

PG Sragi berada di bawah naungan PTPN IX bersama 7 PG Lainnya yaitu PG Gondang Baru, PG Jatibarang, PG Rendeng, PG Sumberharjo, PG Tasikmadu, PG Mojo, dan PG Pangka. Sekalipun berkedudukan di Kabupaten Pekalongan tetapi wilayah kerja PG Sragi meliputi 4 wilayah yaitu Kabupaten Pekalongan sendiri, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.

Hubungan Manajemen dan Buruh

Organisasi Perkebunan menunjukkan perbedaan antara mereka yang mengelola dan mereka yang dikelola dalam artian antara mereka yang diberi kerja/ buruh dan mereka yang memberi kerja atau pemberi kerja. Dalam pertengahan tahun 1830, *gubernement* mulai melakukan aktivitas merekrut tenaga kerja. Secara resmi petani diserap melalui mekanisme kerja berdasarkan kontrak (*suiker contract*). Untuk kerja perekutan ini peranan lurah (kepala desa)

sangat besar sebagai mediasi antara *gubernement* dengan kaum tani, lurah pula yang mengadakan pengaturan kerja dalam industri gula (Mubyarto, 1992: 132).

Serikat pekerja atau serikat buruh dianggap perlu dalam rangka upaya melindungi pekerja/buruh terutama dalam berhadapan dengan pengusaha untuk secara kolektif memperjuangkan hak dan kewajiban buruh dalam melakukan hubungan kerja. Namun perlu diingat bahwa dalam hubungan kerja dalam realitanya seorang majikan akan lebih bebas dari pada seorang buruh. Kondisi demikian terjadi karena sepanjang seorang adalah yang menerima pekerjaan dibawah perintah orang lain dengan mengharapkan imbalan upah, mereka selalu berada di pihak yang lemah dibanding pihak pemberi kerja sehingga di antara mereka ada hubungan yang sifatnya subordinasi (Djumadi, 2005: 7). Oleh karena itu, diharapkan serikat buruh akan mempunyai kekuatan tawar menawar yang lebih kuat dan diharapkan akan mendatangkan kebaikan bagi para pekerja yang menjadi anggotanya beserta keluarganya bahkan bagi yang tidak menjadi anggota serikat buruh tersebut.

Berdasarkan data lisan yang penyusun peroleh, ada 2 serikat pekerja yang berpengaruh besar terhadap kondisi ketenagakerjaan di PG Sragi sebelum era tahun 1965. Masing-masing adalah Serikat Buruh Gula (SBG) yang menjadi kepanjangan tangan PKI dan Kesatuan Buruh Gula (KBG) yang mewakili kepentingan golongan Marhaenis. Sebelum tahun 1965, SBG muncul sebagai kekuatan besar dalam PG Sragi. Begitu masuk ke PG seorang buruh akan langsung ditarik menjadi anggota SBG. Bagi yang tidak mau masuk menjadi anggota seringkali akan mengalami kesulitan dalam hal jenjang karirnya.

Seiring terjadinya peristiwa

Gestapu di tingkat pusat, PKI dan underbow-nya dibekukan kegiatannya dan dilarang keberadaannya. SBG pun kemudian menjadi sebuah organisasi yang terlarang. Untuk menindak lanjuti hal ini pemerintah membentuk sebuah tim yang dikenal sebagai tim screening yang terdiri atas tiga unsur yaitu pemerintah, PG dan kepolisian. Tim screening ini memiliki tugas utama meneliti latar belakang buruh PG Sragi dan mengkrosceknya dengan kenyataan di desa asal si buruh apakah ia terlibat dalam kegiatan PKI atautkah hanya korban hasutan saja. Berdasarkan wawancara dan kroscek yang dilakukan tadi maka buruh yang terlibat atau diduga terlibat dalam aktivitas PKI dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas A yang berisi orang-orang yang jelas-jelas terbukti menjadi fungsionaris PKI akan langsung dilakukan pemecatan dan kelas B yang hanya korban hasutan saja akan dilakukan masa percepatan pensiun.

Setelah Pemilu tahun 1971 organisasi politik yang ada bergabung dalam dua partai politik sehingga organisasi buruh yang bernaung di bawah parpol tersebut menjadi kehilangan induk. Momentum inilah yang dipergunakan oleh pimpinan organisasi buruh saat itu untuk mengeluarkan suatu deklarasi yang disebut "Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia" yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1973. Deklarasi ini berisikan kebulatan tekad kaum buruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam suatu wadah yang disebut Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Bentuk federatif organisasi buruh ini lebih aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan buruh, namun secara politis bentuk federasi ini sering kali sukar dikendalikan karena para buruh seringkali melakukan aksi jika hak-haknya tidak terpenuhi. Kongres FBSI II tanggal 30 November 1985 memutuskan untuk mengubah FBSI menjadi SPSI

serta mengubah struktur organisasi dari federatif menjadi unitaris. Pada tahun 1985 pemerintah menetapkan SPSI sebagai satu-satunya organisasi serikat pekerja yang sah dan diakui oleh pemerintah. Walaupun keputusan ini sempat ditentang oleh ILO (*International Labour Organization*) karena dianggap membatasi hak dari buruh/pekerja, toh keadaan ini tetap berlangsung sampai akhir masa Orde Baru.

Namun dalam kenyataannya, selama Orde Baru SPSI sama sekali tidak pernah masuk menjadi sebuah organisasi bagi buruh di PG Sragi. Keberadaan SPSI dianggap tidak pernah ada sama sekali dalam kehidupan buruh PG. Hal ini terjadi disebabkan sekalipun setiap bulan PG memberikan laporan tembusan kepada UP SPSI tetapi tidak pernah ada kegiatan konkrit dari SPSI dalam kehidupan sehari-hari buruh di PG. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pegawai PG disebutkan bahwa satu-satunya organisasi yang pernah ada dan eksis dalam PG adalah KORPRI. Baru pada tahun 2001 terbentuk serikat pekerja Perkebunan Nusantara IX sebagai organisasi buruh pada perusahaan-perusahaan di bawah PTPN IX yang melakukan rapat tiga bulanan dengan pihak manajemen untuk duduk bersama mengevaluasi permasalahan manajemen dan buruh selama tiga bulan sebelumnya.

Kondisi Sosial Ekonomi Pabrik Gula Sragi

Tanah dan tenaga kerja yang murah adalah unsur pokok sistem perkebunan. Pernyataan demikian amat sulit dibantah terutama pada masa prakermerdekaan Indonesia. Pada saat mana perkebunan menghasilkan aneka komoditi ekspor dan menjadi tulang

panggung ekonomi kolonial yang liberal kapitalistik yang harus bersaing ketat di pasar dunia yakni Eropa dan Amerika.

Permasalahan kemudian timbul pada era 1965-an, dimana nuansa politik sangat kental terasa di dalam semua aspek kehidupan tak terkecuali kehidupan buruh di Pabrik Gula. Seperti dijelaskan diatas bahwa keberadaan Serikat Buruh Gula (SBG) menjadi salah satu penyebabnya. Buruh-buruh industri digerakkan perasaan anti pimpinan yang bukan golongannya sehingga menimbulkan suasana yang tidak baik dalam hubungan perburuhan yang akhirnya membawa akibat ke arah penghambatan produksi. Pemecatan 28 orang yang terlibat langsung dalam kegiatan SBG dan dinyatakan secara positif sebagai anggota PKI di PG Sragi tidaklah terlalu mengguncang keberadaan industri gula. Hal ini terjadi karena begitu seorang buruh terbukti sebagai anggota SBG dan mengalami pemecatan atau pensiun dini maka pihak PG akan langsung mengadakan rekrutmen terbuka guna mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan buruh tadi.

Pada masa Kolonial, hanya pekerja Bangsa Eropa dan etnis Tionghoa saja yang bisa diangkat menjadi pegawai-pegawai tetap yang bergaji sedangkan untuk kerja kasar atau lebih sering disebut dengan kerja kuli biasanya dilakukan oleh penduduk bumi putera yang dikenal dengan sebutan *wong boeroeh* atau kuli. Upah untuk lapisan pekerja ini diberikan berdasarkan jumlah hari kerja yang dilakukan oleh buruh tersebut. Di sini suatu pelembagaan rasial yang mulai dibentuk oleh negara kolonial terwujud dalam diskriminasi upah.

Pada masa sekarang ini, tidak ada kriteria khusus seseorang bisa masuk menjadi pegawai PG asalkan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan. Per-

syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja ini tergantung dalam bagian apa seorang pekerja dibutuhkan. Secara umum persyaratan itu antara lain (1) usia minimal (dalam banyak hal usia minimal bekerja adalah 18 tahun), (2) latar belakang pendidikan (disesuaikan dengan posisi yang dibutuhkan di pabrik), (3) spesifikasi keahlian (disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan).

PG Sragi dipimpin oleh seorang Adiministratur yang membawahi 4 kepala bagian. Masing-masing adalah Kepala Bagian Tanaman, Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan (TUK), Kepala Bagian Pabrikasi dan Kepala Bagian Instalasi. Di bawah keempat Kepala Bagian itu masih terdapat beberapa kepala seksi yang berfungsi sebagai staf. Staf masih terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama disebut sebagai pegawai satu yang berjumlah 42 orang. Lapisan kedua dihuni oleh karyawan yang bekerja langsung di Pabrik baik itu di bagian dalam pabrik maupun di lapangan yang didominasi oleh mandor yang mengepalai lahan pabrik yang disebut kebun dengan masa pensiun pada usia 59 tahun. Pembagian lapisan menjadi lapisan satu dan lapisan dua ini jarang dipakai oleh kalangan buruh pabrik, mereka lebih senang menyebut staf perusahaan sebagai karyawan pimpinan dan mereka yang bekerja di lapangan sebagai karyawan pelaksana.

Berbeda dengan karyawan pelaksana, maka staf memiliki keistimewaan hak. Keistimewaan ini berupa fasilitas perumahan yang berjejer di sebelah selatan pabrik atau tepatnya di seberang jalan depan pabrik. Hermawan Sulistyو dalam bukunya menyebut perumahan ini sebagai loji atau kongsi atau rumah kong. Loji diartikan sebagai kantor atau benteng kompeni masa penjajahan Belanda di Indonesia. Hermawan Sulistyو (2000: 103) mengartikan loji seba-

Tabel 1. Besarnya Pengupahan di PG Sragi tahun 1965-1998 (perbulan)

	1965	1975	1985	1993	1998
upah pokok maksimum	2.251,2	47.289	182.537	704.596	1.361.550
upah pokok minimum	807,26	3421,78	27.636	82.910	156.000

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Pekalongan dan arsip pribadi Sudarno

gai kompleks pemukiman yang tertutup, dijaga, terpisah dan terasing dari lingkungan sekitarnya. Sebelum kemerdekaan, loji sepenuhnya merupakan komunitas Belanda. Semua penghuninya adalah orang Belanda dan hanya ada sedikit orang Jawa. Umumnya mereka beragama Kristen dan dalam kasus pegawai Jawa mereka adalah orang sekuler.

Buruh PG Sragi terutama untuk kalangan buruh kelas II/pelaksana bisa mencapai ribuan orang. Mereka terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok yang bekerja secara permanen sepanjang tahun di PG (pegawai tetap dan pegawai harian) dan kelompok yang hanya bekerja pada saat musim giling yang sering disebut sebagai buruh kampanye. Buruh kampanye ini hanya melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian seperti memanen tebu, mengangkut tebu hingga ke pabrik dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan pembuatan gula selama musim giling.

Jumlah buruh kampanye ini bisa meningkat sampai tiga kali lipat sewaktu panen. PG Sragi menggunakan mandor sebagai alat untuk mencari / merekrut pekerja kampanye. Sebagai contoh nyata dalam pekerjaan tebang. Mandor mencari mereka dengan cara memberitahukan kepada seorang yang telah terbiasa dalam pekerjaan ini. Mereka biasanya secara teratur berkumpul di suatu tempat menunggu truk jemputan untuk membawa mereka

ke lokasi tebang. Kantong-kantong penyuplai pekerja tebang ini hampir ada di setiap kecamatan. Desa Sidomulyo di Kecamatan Kesesi, Desa Sumub Kidul di Kecamatan Sragi dan Desa Doro di Kecamatan Doro adalah beberapa daerah penyuplai tenaga kerja tebang terbanyak bagi PG Sragi di masa lalu.

Pendapatan yang diterima oleh masing-masing mereka yang menduduki strata seperti dijelaskan di atas memiliki perbedaan yang kalau boleh dikatakan kurang begitu mencolok. Hal ini terjadi karena upah buruh disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten sehingga seringkali terdapat kesamaan antara buruh yang satu dengan buruh yang lain. Besar kecilnya upah untuk masing-masing perusahaan berbeda tergantung pada perusahaan serta jenis industri. Baldamus dalam Syahrizal menyebutkan bahwa upah yang diperoleh buruh (*nonskill*), hanyalah merupakan kompensasi atau imbalan atas tenaga yang mereka keluarkan dalam pekerjaan karena pada umumnya mereka tidak dituntut untuk memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang tertentu (Syahrizal, 2006: 79).

Untuk lebih merangsang peningkatan kemampuan kerja, perusahaan memberikan upah/gaji yang sesuai dengan prestasi yang telah diberikan. Selain gaji tetap, karyawan bisa memperoleh tambahan upah/gaji yang diberikan atas dasar penambahan waktu kerja.

PG Sragi membagi karyawan di dalamnya menjadi 3 status berdasarkan cara pengupahannya. *Pertama*, buruh harian/borongan. Buruh borongan didominasi oleh buruh di bagian tebang dan angkut yang menerima upah berdasarkan borongan. Upah diterima setiap hari dengan waktu maksimal 1x24 jam dengan mandor dan juru bayar sebagai penanggung jawab utama dalam hal pembayaran. *Kedua*, buruh kampanye/*rendengan*. Buruh jenis ini bekerja hanya pada saat musim giling saja. Umumnya mereka bekerja di bagian instalasi dan bagian pengolahan baik itu sebagai mekanik maupun operator mesin. Buruh kampanye ini didominasi oleh para pekerja musiman yang bekerja serabutan apabila tidak sedang musim giling. Mereka didominasi oleh para petani, tukang batu, maupun pekerja serabutan lain yang biasanya direkrut karena pengalaman mereka dalam masa giling sebelumnya. Pemberitahuan atas mereka biasanya diberitahukan H-10 masa giling. Buruh kampanye ini menerima upah 2 kali setiap bulannya yaitu pada tanggal 5 dan 20. *Ketiga*, pekerja tetap/karyawan tetap

Para pekerja pabrik maupun perkebunan secara umum, menyebut diri mereka sebagai karyawan, bukan sebagai buruh. Begitu juga pihak perkebunan pimpinan dan mandor yang berada langsung di atas mereka. Hal ini juga berlaku untuk sebutan di perkebunan-perkebunan di Indonesia. Sebutan ini kelihatannya untuk menghindari konotasi negatif dari istilah "buruh" yang mungkin juga berkesan merendahkan. Hermawan Sulistyio menyebutkan bahwa dari segi politik istilah buruh sering dipakai untuk memperjuangkan mereka oleh golongan yang berkuasa yang sering disebut sebagai aliran kiri yang pada ujungnya ingin menciptakan masyarakat komunis (Sulistyio,

2000:107).

Untuk jam kerja dalam PG Sragi setiap tahunnya terbagi menjadi dua periode. Periode pertama adalah periode rehat giling. Waktu kerja yang berlaku adalah 7 jam/hari dan 40 jam/minggu. Periode kedua adalah periode giling, waktu kerja ditambah menjadi 8 jam/hari dan 40 jam/minggu (Disnakertrans Kabupaten Pekalongan).

Pembagian kerja dalam musim giling dibagi atas 3 *shift*, masing-masing adalah: *shift* I 06.30-14.00 wib, *shift* II 14.00-22.00 wib, dan *shift* III 22.00-06.00 wib. Pembagian *shift* ini tidak berlaku bagi karyawan bagian Administrasi dan Umum. Karyawan Administrasi dan Umum mulai bekerja pada 06.00 wib dan berhenti bekerja pada 14.00 wib.

Pada kenyataan di lapangan, apabila seorang buruh ingin mendapatkan hasil yang maksimal maka ia harus bekerja hampir 12 jam/harinya selama mesin pabrik masih beroperasi. Hal ini terjadi karena PG memberlakukan sistem lembur selama musim giling. Apabila seorang buruh ingin mendapatkan hasil maksimal maka ia-pun harus sering melakukan lembur. Hal ini dapat dimaklumi karena biasanya musim giling selalu berakhir manakala mendekati hari raya Idul Fitri sehingga para buruh berlomba untuk mendapatkan upah lembur sebesar-besarnya di samping mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 1 bulan upah dan bonus/gratifikasi sebesar 1 bulan gaji.

Bagi karyawan tetap, pekerjaan sambilan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan tambahan bagi rumah tangga bukanlah suatu hal yang merepotkan. Penghasilan yang diperoleh karyawan tetap cenderung lebih besar jika dibandingkan bekerja sebagai buruh tani atau pada sektor lain diluar PG. Apalagi dengan tunjangan-tunjangan lain yang diterima di luar gaji pokok berdasarkan kepangkatan golon-

gannya, tentunya hal ini semakin memperkuat posisi karyawan tetap dalam kondisi finansialnya. Hal ini terjadi karena pada masa Orde Baru industri gula memang sedang dalam kondisi yang menjanjikan bagi perkembangan ekonomi. Sebagian besar mereka memiliki waktu yang tersisa untuk melakukan pekerjaan lain. Salah satu kegiatan yang dilakukan dan dirasa bisa menambah penghasilan bagi buruh tetap adalah melakukan arisan yang biasanya dilakukan sebulan sekali dengan diikuti oleh karyawan dan istri/suaminya masing-masing.

Berbeda dengan karyawan tetap yang cenderung lebih mapan, karyawan kampanye dapat dimasukkan dalam kategori miskin atau kurang mampu. Pada tahun 1993, BPS telah memberikan standar umum sebagai garis batas kemiskinan yaitu untuk pengeluaran setara dengan 2100 kalori per-kapita ditambah kebutuhan pokok minimum seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan bahan bakar. Semua itu setara dengan uang sebesar Rp.27.905 per-kapita perbulan untuk pedesaan (Syahrizal, 2006:8). Upah minimum buruh dalam tahun yang sama adalah Rp.82.910. Dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas 4 orang anggota keluarga saja maka penghasilan buruh kampanye ini hanya Rp 20.727,50 perbulan, beberapa rupiah di bawah garis kemiskinan. Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kebanyakan anak buruh pabrik dengan golongan rendah hanya dapat mencapai pendidikan setingkat SMP untuk selanjutnya biasanya pergi merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

Di luar sektor pekerjaan mereka sebagai buruh, ada beberapa pekerjaan yang umumnya dilakukan untuk menambah penghasilan, antara lain ber-

tani dan berladang, berdagang makanan dan bahan kebutuhan sehari-hari mulai dari sabun, rokok, gula, dan barang-barang lain. Pesta musim giling yang dilakukan selama seminggu penuh dengan format pasar malam juga dimanfaatkan oleh istri dan buruh yang bekerja di pabrik untuk sekedar mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjajakan barang dagangan berupa warung makan non permanen maupun sekedar menjajakan pernak-pernik mainan anak-anak. Beberapa buruh juga memiliki pekerjaan sampingan dalam bidang jasa seperti tambal ban, penjaga *tape recorder* dalam hajatan, tukang ojek, tukang jahit dalam industri konveksi, dan untuk waktu tertentu juga ada yang bekerja mencetak batu bata.

Bagi karyawan tetap, pekerjaan sambilan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan tambahan bagi rumah tangga bukanlah suatu hal yang merepotkan. Seperti halnya buruh/karyawan lain, maka karyawan tetap juga dibebani kewajiban yang telah ditentukan oleh pabrik dan kepadanya juga memperoleh hak sebagaimana mestinya pekerja di PG Sragi.

Penghasilan yang diperoleh karyawan tetap cenderung lebih besar jika dibandingkan bekerja sebagai buruh tani atau pada sektor lain diluar PG. Apalagi dengan tunjangan-tunjangan lain yang diterima diluar gaji pokok berdasarkan kepangkatan golongannya, tentunya hal ini semakin memperkuat posisi karyawan tetap dalam kondisi finansialnya. Hal ini terjadi karena pada masa Orde Baru industri gula memang sedang dalam kondisi yang menjanjikan bagi perkembangan ekonomi.

Sebagian besar mereka memiliki waktu yang tersisa untuk melakukan pekerjaan lain. Salah satu kegiatan yang dilakukan dan dirasa bisa menambah penghasilan bagi buruh tetap adalah melakukan arisan. Pihak pabrik cenderung

mendukung kegiatan ini karena dirasa akan menambah keakraban diantara karyawan. Di PG Sragi saat ini terdapat 2 kelompok arisan yang tetap eksis. Pembagian 2 kelompok ini berdasarkan pada bidang pekerjaan masing-masing yaitu arisan mandor pabrik dan mandor kebun serta arisan staff pabrik. Arisan ini biasanya dilakukan sebulan sekali dengan diikuti oleh karyawan dan istri/suaminya masing-masing.

Berbeda dengan karyawan tetap yang cenderung lebih mapan, maka karyawan kampanye dapat dimasukkan dalam kategori miskin atau kurang mampu. Pada tahun 1993, BPS telah memberikan standar umum sebagai garis batas kemiskinan yaitu untuk pengeluaran setara dengan 2100 kalori per-kapita ditambah kebutuhan pokok minimum seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan bahan bakar. Semua itu setara dengan uang sebesar Rp 27.905 per-kapita perbulan untuk pedesaan (Syahrizal, 2006: 8).

Upah minimum buruh dalam tahun yang sama adalah Rp 82.910. Dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas empat orang anggota keluarga saja maka penghasilan buruh kampanye ini hanya Rp 20.727,5 perbulan, beberapa rupiah dibawah garis kemiskinan. Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kebanyakan anak buruh pabrik dengan golongan rendah hanya dapat mencapai pendidikan setingkat SMP untuk selanjutnya biasanya pergi merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

Pada musim giling, buruh/ karyawan kampanye memiliki lebih sedikit waktu luang dibandingkan dengan karyawan harian tetap. Hal ini menyebabkan sebagian besar dari mereka merasa tidak punya waktu lain dan juga lelah untuk bekerja lagi. Di luar peker-

jaan mereka sebagai buruh, ada beberapa pekerjaan yang umumnya mereka lakukan antara lain pada sektor pertanian.

Dalam sektor pertanian ini antara lain tampak dari usaha buruh untuk menambah penghasilan dengan bertani dan berladang. Sebagian besar mengerjakan sawah ataupun ladang baik itu ladang dan sawah sendiri ataupun sawah dan ladang orang lain. Seperti dituturkan oleh seorang buruh kampanye bahwa jika di luar masa giling, ia mengerjakan sawah milik mertuanya dan kadang-kadang milik orang lain jika ia mendapat tempahan. Dalam masa gilingpun tak jarang ia mengerjakan sawah. Sawah itu dikerjakan setiap pulang kerja setelah pukul 14.00 dan akan pulang menjelang maghrib.

Selain sektor pertanian, ada pula yang bergerak di sektor perdagangan. Berjualan merupakan pekerjaan sampingan yang cukup menjanjikan bagi buruh. Beberapa dari narasumber mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menghidupi keluarga kalau hanya mengandalkan upah mereka sebagai buruh saja. Mereka mengaku istri-istri mereka membuka warung dirumah sebagai penambah penghasilan. Di samping warung, ada juga beberapa orang yang berjualan keliling. Warung yang dibuka itu biasanya menyediakan makanan dan bahan kebutuhan sehari-hari mulai dari sabun, rokok, gula, dan barang-barang lain.

Pesta pembukaan musim giling juga seringkali menjadi sasaran bagi buruh dan keluarga untuk menjadi pedagang dadakan. Pesta musim giling yang dilakukan selama seminggu penuh dengan format pasar malam itu dimanfaatkan oleh istri dan buruh yang bekerja di pabrik untuk sekedar mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjajakan barang dagangan berupa warung makan non permanen maupun sekedar

menjajakan pernak-pernik mainan anak-anak.

Usaha peternakan juga sering kali menjadi pilihan bagi buruh kampanye. Seorang narasumber bernama Warso mengatakan bahwa dalam waktu senggangnya ia melakukan usaha peternakan sekalipun hanya kecil-kecilan dengan memelihara ayam dan itik dalam jumlah yang terbatas.

Beberapa buruh juga memiliki pekerjaan sampingan dalam bidang jasa seperti tambal ban, penjaga *tape recorder* dalam hajatan, tukang ojek, tukang jahit dalam industri konveksi, dan untuk waktu tertentu juga ada yang bekerja mencetak batu bata.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. PG Sragi didirikan oleh Firma *An-nement and Co* pada tahun 1836 di lahan seluas 141.270 meter persegi di kawasan Desa Sragi Kabupaten Pekalongan untuk memenuhi kebutuhan produksi gula yang besar pada masa tanam paksa guna keperluan ekspor dan kebutuhan dalam Negeri Hindia Belanda. Buruh pabrik atau secara umum dalam industri perkebunan disebut sebagai buruh perkebunan merupakan satu kelompok yang tergolong miskin. Bagi buruh harian tetap, kehidupan mereka cenderung lebih terjamin. Berbeda dengan buruh kampanye yang hanya bekerja apabila masa giling dan hanya apabila mendapatkan panggilan. Mereka sebagian besar terdiri atas orang-orang yang tidak mempunyai keahlian khusus dan akan kehilangan pekerjaan apabila masa giling berakhir. Pekerjaan sebagai buruh pabrik hanya mereka lakukan sebagai pekerjaan tambahan saja. Secara umum sebenarnya mereka adalah petani, pedagang, buruh serabutan maupun peker-

jaan lain yang mereka lakukan di luar jam kerja mereka sebagai buruh pabrik pada waktu musim giling.

Peristiwa G 30 S membawa perubahan drastis dalam kehidupan organisasi-organisasi buruh di Indonesia. Organisasi-organisasi buruh yang non-komunis tetap berdiri sedangkan yang pro-komunis semuanya dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Episode terpenting pasca Peristiwa G 30 S di PG Sragi adalah dilarangnya keberadaan Serikat Buruh Gula (SBG) yang merupakan organisasi buruh pro-komunis yang pernah berkembang di dalam PG Sragi serta dipecatnya 28 orang buruh yang dianggap terlibat langsung dalam aktivitas SBG maupun PKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi, Dianto. 2004. *Hantaman Neo-liberalisme Terhadap Industri Gula di Indonesia*. Jakarta: IGJ.
- Breman, Jan. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja : Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Cahyono, Edi. 1988. "Karesidenan Pekalongan Kurun *Cultuurstelsel*: Masyarakat Pribumi Menyongsong Pabrik Gula". *Skripsi*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Djumadi. 2005. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hadiz, Vedi R. 1994. "Gerakan Buruh dalam Sejarah Politik Indonesia". dalam *Prisma* No. 10 tahun XXIII. 1994. Jakarta: LP3ES.
- Iskandar, Muhaimin A. 2004. *Membajak di Ladang Mesin: Simpang Kepentingan Buruh-Negara-Modal di Tengah Arus Kapitalisme Global*. Semarang: Yayasan Wahyu Sosial.

- Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Legawa. 1978. *Hukum Kepegawaian dan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan Milik Negara*. Yogyakarta: Lembaga Pendi-dikan Perkebunan Negara.
- Linblad, Thomas J (ed). 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moertopo, Ali. 1975. *Buruh dan Tani dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi.
- Mubyarto. 1984. *Masalah Industri Gula di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Mubyarto dan Daryanti. 1991. *Gula: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto, dkk. 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ratnawati. 2001. "Sejarah Perkembangan Pabrik Gula Sragi tahun 1985-1995 dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pekalongan". *Skripsi*. Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang.
- Ricklefs, M.C. 2001. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Serambi.
- Suhartono. 1986. *Sejarah Berdirinya PTP XV-XVI*. Solo: Balai Pustaka.
- Sulistyo, Bambang. 1995. *Pemogokan Buruh, Sebuah Kajian Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu*. Jakarta: KPG.
- Sunindhia, YW dan Widiyanti. 1988. *Masalah PHK dan Pemogokan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syahrizal. 2006. *Strategi Buruh Perkebunan Mengatasi Kemiskinan*. Padang: Andalas University Press.
- Toha, Halili dkk. 1991. *Hubungan Majikan dan Buruh*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: Unnes Press
- Yuliati, Dewi. 2004. "Terbentuknya Kesadaran Kelas Buruh di Semarang", dalam *Hayam Wuruk* No. 2 tahun XIV/2004: LPM Hayam Wuruk, Fakultas Sastra Undip